



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.283, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 145/PMK.07/2009

TENTANG

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN
ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM
UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERUBAHANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4653);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) dan perubahannya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERUBAHANNYA.

Pasal 1

- (1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006 dan 2007 dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum sepenuhnya menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai realisasi penerimaan PBB tahun bersangkutan.
- (2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2008 dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum sepenuhnya menyerap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan pagu dalam Surat Keputusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2008 serta daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum sepenuhnya menerima Biaya Pemungutan PBB sesuai realisasi penerimaan PBB tahun 2008.
- (3) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006 dan 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp917.299.243,00

(sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

- (4) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp122.593.628.610,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri:
 - a. Alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian Pemerintah Daerah yang dibagikan kepada provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp119.170.501.758,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) ; dan
 - b. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp3.423.126.852,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak TA 2006, 2007 dan 2008 berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya.
- (2) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006 dan 2007 untuk masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun Anggaran 2009.
- (2) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat pengesahan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 145/PMK.07/2009 TENTANG
 ALOKASI KURANG BAYAR DANA
 BAGI HASIL PAJAK TAHUN
 ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008
 YANG DIALOKASIKAN DALAM
 UNDANG-UNDANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
 DAN PERUBAHANNYA

**PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PBB TAHUN ANGGARAN 2006 DAN 2007
 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	TAHUN ANGGARAN	Biaya Pemungutan PBB
1	Provinsi Sumatera Barat	2006	42,450,823
2	Kab. Sijunjung	2006	44,045,455
3	Kota Sawahlunto	2006	43,685,762
4	Kab. Dharmasraya	2006	46,624,917
5	Kab. Lampung Tengah	2006	501,972,334
6	Kota Mataram	2007	238,011,901
7	Kab. Pohuwato	2007	508,051
	Total		917,299,243

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 145/PMK.07/2009 TENTANG
 ALOKASI KURANG BAYAR DANA
 BAGI HASIL PAJAK TAHUN
 ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008
 YANG DIALOKASIKAN DALAM
 UNDANG-UNDANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
 DAN PERUBAHANNYA

**PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008 YANG
 DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	258,206,910
1	Kab. Aceh Barat	86,247,898
2	Kab. Aceh Besar	66,481,570
3	Kab. Aceh Selatan	24,610,622
4	Kab. Aceh Singkil	111,508,092
5	Kab. Aceh Tengah	22,423,741
6	Kab. Aceh Tenggara	36,015,907
7	Kab. Aceh Timur	190,711,811
8	Kab. Aceh Utara	526,378,490
9	Kab. Bireuen	28,160,917
10	Kab. Aceh Pidie	22,268,623
11	Kab. Simeuleu	8,376,822
12	Kota Banda Aceh	139,368,817
13	Kota Sabang	9,233,816
14	Kota Langsa	71,332,678
15	Kota Lhokseumawe	79,550,624
16	Kab. Nagan Raya	105,925,836
17	Kab. Aceh Jaya	38,350,158
18	Kab. Aceh Barat Daya	21,769,003
19	Kab. Gayo Lues	15,906,513
20	Kab. Aceh Tamiang	116,505,748
21	Kab. Bener Meriah	25,958,415
22	Kab. Pidie Jaya	15,982,574
23	Kota Subulussalam	19,105,634
II	Provinsi Sumatera Utara	791,713,279
1	Kab. Asahan	497,090,765
2	Kab. Dairi	87,923,252
3	Kab. Deli Serdang	573,259,362
4	Kab. Karo	227,066,968
5	Kab. Labuhan Batu	2,404,468,014
6	Kab. Langkat	769,827,338
7	Kab. Mandailing Natal	233,731,749
8	Kab. Nias	38,921,926

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
9	Kab. Simalungun	909,188,522
10	Kab. Tapanuli Selatan	925,473,412
11	Kab. Tapanuli Tengah	125,093,951
12	Kab. Tapanuli Utara	51,300,997
13	Kab. Toba Samosir	39,436,679
14	Kota Binjai	32,958,494
15	Kota Medan	355,533,864
16	Kota Pematang Siantar	186,734,505
17	Kota Sibolga	85,449,698
18	Kota Tanjung Balai	68,920,350
19	Kota Tebing Tinggi	168,822,652
20	Kota Padang Sidempuan	107,699,521
21	Kab. Pakpak Bharat	11,456,045
22	Kab. Nias Selatan	15,728,960
23	Kab. Humbang Hasundutan	51,712,351
24	Kab. Serdang Bedagai	32,789,121
25	Kab. Samosir	11,887,444
26	Kab. Batu Bara	313,923,135
III	Provinsi Sumatera Barat	1,344,206,445
1	Kab. Limapuluh Kota	96,090,724
2	Kab. Agam	10,148,835
3	Kab. Kepulauan Mentawai	10,925,325
4	Kab. Padang Pariaman	171,423,184
5	Kab. Pasaman	64,961,366
6	Kab. Pesisir Selatan	111,388,923
7	Kab. Sijunjung	132,882,387
8	Kab. Solok	153,904,433
9	Kab. Tanah Datar	135,608,360
10	Kota Bukit Tinggi	103,146,943
11	Kota Padang Panjang	18,695,118
12	Kota Padang	902,086,736
13	Kota Payakumbuh	55,145,930
14	Kota Sawahlunto	37,765,791
15	Kota Solok	30,200,031
16	Kota Pariaman	21,780,884
17	Kab. Pasaman Barat	239,655,050
18	Kab. Dharmasraya	133,936,554

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
19	Kab. Solok Selatan	125,929,280
IV	Provinsi Riau	2,347,020,930
1	Kab. Bengkalis	340,799,989
2	Kab. Indragiri Hilir	453,185,941
3	Kab. Indragiri Hulu	280,364,038
4	Kab. Kampar	893,155,121
5	Kab. Kuantan Singingi	283,815,926
6	Kab. Pelalawan	799,846,124
7	Kab. Rokan Hilir	349,009,439
8	Kab. Siak	711,145,928
9	Kota Dumai	1,427,479,493
10	Kota Pekanbaru	1,153,668,318
V	Provinsi Kepulauan Riau	1,388,094,662
1	Kab. Bintan	881,089,036
2	Kab. Natuna	9,302,919
3	Kab. Karimun	511,398,014
4	Kota Batam	1,694,589,888
5	Kota Tanjung Pinang	91,458,631
6	Kab. Lingga	11,535,609
VI	Provinsi Jambi	864,337,020
1	Kab. Batanghari	116,375,874
2	Kab. Kerinci	33,639,254
3	Kab. Merangin	4,438,098
4	Kab. Muaro Jambi	53,688,488
5	Kab. Sarolangun	18,880,489
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	45,504,206
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	129,002,664
8	Kab. Tebo	39,197,518
9	Kota Jambi	66,813,369
VII	Provinsi Sumatera Selatan	232,006,124
1	Kab. Lahat	7,911,603
2	Kab. Musi Banyuasin	151,840,650
3	Kab. Musi Rawas	2,505,433
4	Kab. Muara Enim	109,688,857
5	Kab. Ogan Komering Ilir	271,866,822
6	Kab. Ogan Komering Ulu	46,869,426
7	Kota Palembang	60,222,945

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
8	Kota Pagar Alam	45,454,185
9	Kota Prabumulih	26,210,389
10	Kab. Banyuasin	45,813,827
11	Kab. Ogan Ilir	84,176,573
12	Kab. OKU Timur	71,324,772
13	Kab. OKU Selatan	39,046,412
14	Kab. Empat Lawang	23,213,644
VIII	Provinsi Bangka Belitung	84,501,559
1	Kab. Bangka	1,213,665
2	Kab. Belitung	1,233,126
3	Kota Pangkal Pinang	270,962,965
4	Kab. Bangka Selatan	98,279,316
5	Kab. Bangka Barat	42,132,254
6	Kab. Belitung Timur	1,262,291
IX	Provinsi Bengkulu	418,482,540
1	Kab. Bengkulu Utara	172,593,384
2	Kab. Rejang Lebong	44,901,851
3	Kota Bengkulu	177,934,229
4	Kab. Kaur	13,886,298
5	Kab. Seluma	49,847,944
6	Kab. Mukomuko	100,753,063
7	Kab. Lebong	3,286,136
8	Kab. Kepahiang	29,557,277
X	Provinsi Lampung	362,616,534
1	Kab. Lampung Barat	72,043,368
2	Kab. Lampung Selatan	166,697,845
3	Kab. Lampung Tengah	138,546,777
4	Kab. Lampung Utara	156,887,127
5	Kab. Lampung Timur	164,061,386
6	Kab. Tanggamus	219,964,015
7	Kab. Tulang Bawang	291,575,058
8	Kab. Way Kanan	47,367,175
9	Kota Bandar Lampung	73,414,947
10	Kota Metro	26,675,791
XI	Provinsi DKI Jakarta	18,245,090,863
XII	Provinsi Jawa Barat	868,692,203
1	Kab. Bandung	1,359,663,129

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
2	Kab. Bekasi	471,549,534
3	Kab. Bogor	867,444,153
4	Kab. Cianjur	252,111,111
5	Kab. Cirebon	1,892,712,949
6	Kab. Garut	398,725,946
7	Kab. Indramayu	26,689,922
8	Kab. Karawang	346,570,889
9	Kab. Majalengka	4,111,419
10	Kab. Purwakarta	47,661,530
11	Kab. Subang	423,139,556
12	Kab. Sukabumi	270,618,353
13	Kab. Sumedang	40,495,799
14	Kab. Tasikmalaya	30,258,879
15	Kota Bandung	671,656,010
16	Kota Bekasi	223,497,886
17	Kota Bogor	281,707,292
18	Kota Cirebon	29,294,192
19	Kota Depok	245,663,040
20	Kota Sukabumi	18,256,817
21	Kota Cimahi	329,423,625
22	Kota Tasikmalaya	29,803,737
23	Kota Banjar	2,202,617
24	Kab. Bandung Barat	345,904,362
XIII	Provinsi Banten	328,280,709
1	Kab. Lebak	185,861,332
2	Kab. Pandeglang	88,738,677
3	Kab. Serang	427,544,120
4	Kab. Tangerang	254,295,670
5	Kota Tangerang	1,528,325,383
XIV	Provinsi Jawa Tengah	1,700,869,856
1	Kab. Banjarnegara	23,467,624
2	Kab. Banyumas	48,401,040
3	Kab. Batang	215,204,544
4	Kab. Blora	143,459,188
5	Kab. Boyolali	73,008,458
6	Kab. Brebes	43,094,631
7	Kab. Cilacap	65,856,943

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
8	Kab. Demak	359,099,715
9	Kab. Grobogan	4,585,158
10	Kab. Jepara	203,101,857
11	Kab. Karanganyar	546,496,399
12	Kab. Kebumen	84,235,772
13	Kab. Kendal	267,217,897
14	Kab. Klaten	316,686,672
15	Kab. Kudus	55,880,339
16	Kab. Magelang	10,029,888
17	Kab. Pati	114,411,629
18	Kab. Pekalongan	19,329,718
19	Kab. Pemasang	80,537,258
20	Kab. Purbalingga	1,017,776
21	Kab. Purworejo	127,046,720
22	Kab. Rembang	21,434,396
23	Kab. Semarang	502,653,620
24	Kab. Sragen	167,536,379
25	Kab. Sukoharjo	381,218,385
26	Kab. Tegal	339,637,615
27	Kab. Temanggung	89,838,688
28	Kab. Wonogiri	326,171,042
29	Kab. Wonosobo	129,483,391
30	Kota Magelang	4,517,165
31	Kota Pekalongan	5,590,356
32	Kota Salatiga	13,568,909
33	Kota Surakarta	162,790,182
34	Kota Tegal	149,476,736
XV	Provinsi DI Yogyakarta	158,215,526
1	Kab. Bantul	319,180,662
2	Kab. Gunung Kidul	5,932,502
3	Kab. Kulon Progo	14,958,379
4	Kab. Sleman	1,364,762,787
5	Kota Yogyakarta	119,755,695
XVI	Provinsi Jawa Timur	2,033,800,975
1	Kab. Bangkalan	39,467,714
2	Kab. Banyuwangi	624,780,236
3	Kab. Blitar	509,690,354

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
4	Kab. Bojonegoro	67,981,676
5	Kab. Bondowoso	62,465,848
6	Kab. Gresik	136,374,901
7	Kab. Jember	870,310,238
8	Kab. Jombang	251,233,280
9	Kab. Kediri	1,629,823
10	Kab. Lamongan	242,745,445
11	Kab. Lumajang	41,379,750
12	Kab. Madiun	206,872,513
13	Kab. Magetan	99,491,720
14	Kab. Malang	128,080,266
15	Kab. Mojokerto	144,234,694
16	Kab. Nganjuk	33,922,717
17	Kab. Ngawi	94,703,876
18	Kab. Pacitan	34,277,828
19	Kab. Pamekasan	154,020,622
20	Kab. Pasuruan	387,738,929
21	Kab. Ponorogo	12,361,263
22	Kab. Probolinggo	35,573,425
23	Kab. Sampang	76,801,659
24	Kab. Sidoarjo	248,806,253
25	Kab. Situbondo	261,658,717
26	Kab. Sumenep	86,370,569
27	Kab. Trenggalek	40,573,632
28	Kab. Tuban	46,786,535
29	Kab. Tulungagung	17,301,491
30	Kota Blitar	4,514,820
31	Kota Kediri	113,453,379
32	Kota Malang	120,063,933
33	Kota Mojokerto	19,639,827
34	Kota Pasuruan	10,846,900
35	Kota Probolinggo	216,545,725
36	Kota Surabaya	861,952,685
37	Kota Batu	35,051,638
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	296,229,315
1	Kab. Bengkayang	44,358,543
2	Kab. Landak	20,356,555

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
3	Kab. Kapuas Hulu	63,022,332
4	Kab. Ketapang	352,220,314
5	Kab. Sambas	11,539,899
6	Kab. Sanggau	109,768,084
7	Kab. Sintang	32,741,146
8	Kota Pontianak	15,210,576
9	Kota Singkawang	3,476,637
10	Kab. Sekadau	644,293
11	Kab. Melawi	32,700,482
12	Kab. Kayong Utara	12,757,346
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	1,609,496,698
1	Kab. Barito Selatan	40,261,520
2	Kab. Barito Utara	104,055,766
3	Kab. Kapuas	21,279,034
4	Kab. Kotawaringin Barat	40,575,051
5	Kab. Kotawaringin Timur	332,518,789
6	Kota Palangkaraya	117,164,240
7	Kab. Barito Timur	34,565,504
8	Kab. Murung Raya	93,091,430
9	Kab. Pulang Pisau	22,957,969
10	Kab. Gunung Mas	11,178,294
11	Kab. Lamandau	48,316,003
12	Kab. Sukamara	12,259,270
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	963,401,058
1	Kab. Banjar	16,739,441
2	Kab. Hulu Sungai Selatan	7,281,867
3	Kab. Hulu Sungai Utara	10,992,760
4	Kab. Kota Baru	81,578,419
5	Kab. Tabalong	14,811,587
6	Kab. Tanah Laut	10,726,982
7	Kab. Tapin	66,636,150
8	Kota Banjar Baru	76,621,700
9	Kota Banjarmasin	148,520,080
10	Kab. Balangan	10,436,606
11	Kab. Tanah Bumbu	43,305,499
XX	Provinsi Kalimantan Timur	3,343,797,075
1	Kab. Berau	230,503,021

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
2	Kab. Bulungan	131,526,643
3	Kab. Kutai Kartanegara	513,065,115
4	Kab. Kutai Barat	335,358,187
5	Kab. Kutai Timur	331,947,014
6	Kab. Malinau	47,396,700
7	Kab. Nunukan	96,754,845
8	Kab. Paser	73,013,330
9	Kota Balikpapan	149,753,055
10	Kota Bontang	15,198,555
11	Kota Samarinda	76,754,521
12	Kota Tarakan	242,402,712
13	Kab. Penajam Paser Utara	78,171,570
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	519,052,902
1	Kab. Bolaang Mongondow	163,409,223
2	Kab. Minahasa	157,528,345
3	Kab. Sangihe	20,938,026
4	Kota Bitung	43,676,569
5	Kota Manado	691,813,792
6	Kab. Kepulauan Talaud	109,669,300
7	Kab. Minahasa Selatan	32,767,372
8	Kota Tomohon	102,922,760
9	Kab. Minahasa Utara	119,020,239
10	Kota Kotamobagu	44,375,507
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	30,989,069
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,389,938
13	Kab. Minahasa Tenggara	37,433,569
XXII	Provinsi Gorontalo	26,008,908
1	Kab. Boalemo	20,815,684
2	Kab. Gorontalo	153,145,265
3	Kab. Pohuwato	1,901,842
4	Kab. Bone Bolango	58,081,128
5	Kab. Gorontalo Utara	1,919,830
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	548,733,233
1	Kab. Banggai	190,487,025
2	Kab. Banggai Kepulauan	51,299,652
3	Kab. Buol	72,479,995
4	Kab. Toli-Toli	29,936,161

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
5	Kab. Donggala	46,733,257
6	Kab. Morowali	127,329,132
7	Kab. Poso	78,137,786
8	Kota Palu	140,755,379
9	Kab. Parigi Moutong	141,573,385
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	799,213,673
1	Kab. Bantaeng	27,078,725
2	Kab. Barru	8,538,518
3	Kab. Bone	41,342,201
4	Kab. Enrekang	55,122,971
5	Kab. G o w a	11,544,637
6	Kab. Jeneponto	52,440,090
7	Kab. Luwu	26,464,044
8	Kab. M a r o s	19,316,251
9	Kab. Pangkajene Kepulauan	221,587,775
10	Kab. Pinrang	261,341,623
11	Kab. Selayar	33,827,229
12	Kab. Sidenreng Rappang	177,109,317
13	Kab. Sinjai	1,482,346
14	Kab. Soppeng	123,086,184
15	Kab. Takalar	97,101,174
16	Kab. Tana Toraja	12,750,443
17	Kab. Wajo	85,783,644
18	Kota Makassar	2,593,761,215
19	Kota Palopo	11,000,316
20	Kab. Luwu Timur	633,840,631
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	118,997,593
1	Kab. Mamuju	12,293,230
2	Kab. Polewali Mandar	54,358,680
3	Kab. Mamasa	15,101,429
4	Kab. Mamuju Utara	175,614,450
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	231,077,089
1	Kab. Buton	232,738,968
2	Kab. Konawe	255,002,317
3	Kab. Kolaka	109,903,569
4	Kab. Muna	194,395,244
5	Kota Kendari	16,188,023

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
6	Kota Bau-bau	130,719,952
7	Kab. Konawe Selatan	27,688,703
8	Kab. Bombana	166,647,018
9	Kab. Wakatobi	14,020,661
10	Kab. Kolaka Utara	46,559,017
11	Kab. Konawe Utara	99,425,906
12	Kab. Buton Utara	18,413,467
XXVII	Provinsi Bali	352,495,868
1	Kab. Badung	532,261,807
2	Kab. Bangli	251,907,037
3	Kab. Buleleng	402,599,532
4	Kab. Gianyar	117,053,491
5	Kab. Jembrana	353,890,599
6	Kab. Karangasem	199,849,972
7	Kab. Klungkung	125,271,267
8	Kab. Tabanan	100,291,790
9	Kota Denpasar	369,307,175
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	271,228,869
1	Kab. Bima	132,063,001
2	Kab. Dompu	24,810,070
3	Kab. Lombok Tengah	270,452,370
4	Kab. Lombok Timur	223,254,311
5	Kab. Sumbawa	33,990,345
6	Kota Mataram	51,910,410
7	Kota Bima	14,220,942
8	Kab. Sumbawa Barat	328,024,815
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	425,976,907
1	Kab. Alor	70,373,882
2	Kab. Belu	4,274,176
3	Kab. Ende	58,048,780
4	Kab. Flores Timur	60,459,483
5	Kab. Kupang	114,716,528
6	Kab. Lembata	30,033,166
7	Kab. Manggarai	124,613,985
8	Kab. Ngada	27,131,719
9	Kab. Sikka	93,827,224
10	Kab. Sumba Barat	33,969,600

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
11	Kab. Sumba Timur	12,213,389
12	Kab. Timor Tengah Selatan	113,885,752
13	Kab. Timor Tengah Utara	90,176,969
14	Kota Kupang	59,045,551
15	Kab. Rote Ndao	33,753,051
16	Kab. Manggarai Barat	40,862,916
17	Kab. Nagekeo	22,786,239
18	Kab. Sumba Barat Daya	63,014,823
19	Kab. Sumba Tengah	13,891,877
XXX	Provinsi Maluku	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	37,907,792
2	Kab. Maluku Tengah	56,738,366
3	Kab. Maluku Tenggara	47,852,641
4	Kab. Pulau Buru	30,658,560
5	Kota Ambon	241,979,541
6	Kab. Seram Bagian Barat	5,524,250
7	Kab. Seram Bagian Timur	92,451,447
8	Kab. Kepulauan Aru	14,141,474
XXXI	Provinsi Maluku Utara	77,418,821
1	Kab. Halmahera Tengah	5,499,010
2	Kab. Halmahera Barat	33,343,846
3	Kota Ternate	37,632,310
4	Kab. Halmahera Timur	302,653,105
5	Kota Tidore Kepulauan	2,096,244
6	Kab. Kepulauan Sula	23,051,224
7	Kab. Halmahera Selatan	39,116,549
8	Kab. Halmahera Utara	165,427,139
XXXII	Provinsi Papua	2,628,612,073
1	Kab. Biak Numfor	91,748,323
2	Kab. Jayapura	74,901,955
3	Kab. Jayawijaya	49,702,265
4	Kab. Merauke	33,600,150
5	Kab. Mimika	2,690,759,522
6	Kab. Nabire	57,619,733
7	Kab. Paniai	157,882,024
8	Kab. Puncak Jaya	36,259,909
9	Kab. Yapen Waropen	32,762,070

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
10	Kota Jayapura	339,254,510
11	Kab. Sarmi	44,384,049
12	Kab. Keerom	124,557
13	Kab. Yahukimo	32,867,729
14	Kab. Pegunungan Bintang	31,523,778
15	Kab. Tolikara	31,785,407
16	Kab. Boven Digoel	136,759,495
17	Kab. Mappi	40,881,190
18	Kab. Asmat	10,119,144
19	Kab. Waropen	26,327,004
20	Kab. Supiori	15,179,040
21	Kab. Mamberamo Raya	18,018,615
XXXIII	Provinsi Papua Barat	1,071,111,104
1	Kab. Sorong	106,916,552
2	Kab. Manokwari	81,468,729
3	Kab. Fak Fak	76,825,689
4	Kota Sorong	364,303,135
5	Kab. Sorong Selatan	29,819,948
6	Kab. Raja Ampat	93,153,693
7	Kab. Teluk Bintuni	114,578,057
8	Kab. Teluk Wondama	13,539,800
9	Kab. Kaimana	4,336,826
	Total	119,170,501,758

,MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 145/PMK.07/2009 TENTANG
 ALOKASI KURANG BAYAR DANA
 BAGI HASIL PAJAK TAHUN
 ANGGARAN 2006, 2007, DAN 2008
 YANG DIALOKASIKAN DALAM
 UNDANG-UNDANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
 DAN PERUBAHANNYA

**PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN
 PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 TAHUN ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	PPH WPOPDN	PPH Pasal 21	Jumlah
1	Provinsi DKI Jakarta	30,204,368	222,313,622	252,517,990
2	Kab. Bekasi	-	2,206,378,412	2,206,378,412
3	Kab. Kudus	964,230,450	-	964,230,450
	Total	994,434,818	2,428,692,034	3,423,126,852

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI